

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun jumlah kasus korupsi terus meningkat setiap tahun. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, yang menjatuhkan hukuman kepada Direktur Utama PT Solusi Imaji Media, John Erens Rengku, atas penyalahgunaan fasilitas kredit dari Bank DKI untuk proyek pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengevaluasi apakah putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan, kekaburan, dan kontradiksi hukum dalam putusan tersebut, terutama terkait penafsiran makna melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi hukum yang lebih komprehensif serta penerapan prinsip hukum yang konsisten. Putusan hakim dalam kasus ini dianggap belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif, meskipun telah memenuhi keadilan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi, serta menjadi referensi bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim

ABSTRACT

Law enforcement against corruption crimes in Indonesia has been regulated by various laws and regulations, yet the number of corruption cases continues to increase each year. This study focuses on a judicial analysis of the Central Jakarta District Court's decision Number 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, which sentenced the CEO of PT Solusi Imaji Media, John Erens Rengku, for the misuse of credit facilities from Bank DKI for a government project. This research aims to understand the judicial considerations behind the court's decision and to evaluate whether the decision has provided a sense of justice and a deterrent effect for the perpetrators of corruption crimes. The method used is normative juridical with a literature approach. The research data sources consist of primary legal materials such as legislation and court decisions, as well as secondary legal materials from books, journals, and other relevant literature. The research findings reveal legal gaps, ambiguities, and contradictions in the decision, particularly concerning the interpretation of "unlawful acts" and "abuse of power." To address these issues, more comprehensive legal revisions and consistent application of legal principles are necessary. The court's decision in this case is considered to have not fully provided substantive justice, although it has met formal justice according to the applicable legal provisions. This research is expected to contribute to the development of legal science, particularly in the field of corruption crimes, and serve as a reference for legal practitioners and law enforcement officers in handling similar cases in the future.

Keywords : Corruption Crime, Judge's Decision